



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor : W.16-U6/ 20 /OT.00/1/2020

TENTANG

ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MELAKSANAKAN
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Membaca : 1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia;

2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : W.16-U6/ 17 /OT.00/SK/KPN/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung suksesnya Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dan mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung” perlu dilakukan upaya melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu dengan membuat Isu Internal dan Eksternal;

b. Bahwa untuk mengimplementasikan dan memperlancar jalannya Sistem Manajemen Mutu dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Audit Internal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

c. Bahwa untuk setiap bagian harus membuat Isu Internal Eksternal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat: 1



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 81/144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM MELAKSANAKAN AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Bahwa setiap bagian harus membuat Isu Internal Eksternal pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KEDUA : Tim Audit Internal bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-3-

- KETIGA : Tim Audit Internal bekerja dengan penuh tanggung jawab yang didasari atas keiklasan dengan berpedoman kepada Manual Mutu Sistem manajemen Mutu pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





NOMOR	URAIAN ISU INTERNAL
ISU TEKNOLOGI	
1.	Adanya Website Pengadilan Negeri Buntok (www.pn-Buntok.go.id)
2.	Adanya Email PN Buntok (pn_Buntok@yahoo.com)
3.	Adanya Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
4.	Adanya Aplikasi E-Library
5.	Adanya Aplikasi Simulasi Biaya Panjar Perkara
6.	Adanya Aplikasi E-Delegasi
7.	Adanya SMS Gate away untuk Informasi dan Pengaduan
ISU KEBIJAKAN / REGULASI	
1.	Target input data perkara ke dalam aplikasi SIPP adalah 1 (satu) hari
2.	Menetapkan Sistem Pelayanan "One Day Service"
3.	Penetapan Penyesuaian Jam Kerja
4.	Penertiban Pengenaan Baju Seragam beserta tanda pengenalnya
5.	Penertiban Keamanan di lingkungan Pengadilan Negeri Buntok
6.	Penetapan Jadwal Perwira Piket bagi Hakim dan Pegawai
ISU KINERJA ORGANISASI	
1.	Adanya Pemisahan Struktur Organisasi berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015
2.	Penertiban Pengelola Website untuk mengupdate perkembangan pada website PN Buntok
3.	Terdapat Kekurangan SDM pada Pengadilan Negeri Buntok sehingga banyak Pegawai yang rangkap tugas
4.	Dilaksanakan Rapat Berjenjang, mulai dari Tingkat Sub Bagian sampai Tingkat Pimpinan
5.	Penertiban pelaksanaan tupoksi agar sesuai dengan SOP dan Instruksi Kerja
6.	Penandatanganan Pakta Integritas
7.	Pengisian Buku Kegiatan Kerja
8.	Pengisian Buku Penilaian Kerja

9.	Penertiban Penyelesaian Penanganan Perkara yang tepat waktu.
10.	Pelaksanaan Transparansi Anggaran
	ISU SARANA PRASARANA.
1.	Penertiban Pengisian Aplikasi Persediaan
2.	Penertiban tata cara Penyimpanan SAPRAS
3.	Pembuatan SK Penanggung Jawab SAPRAS
4.	Pembuatan Jadwal Pemeliharaan SAPRAS
5.	Penertiban Pelabelan SAPRAS
6.	Penertiban pembuatan laporan yang berkaitan dengan BMN
7.	Pengelolaan penyediaan ATK dan persediaan kebutuhan perkantoran lainnya setiap bulan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran
8.	Penertiban pemeriksaan dan perubahan DIR
9.	Pengelolaan dan penyelesaian PSP
NOMOR	URAIAN ISU EKSTERNAL
1.	Pengisian Aplikasi SIKEP dan SIM PEG
2.	Pengisian Aplikasi KOMDANAS
3.	Pengisian Aplikasi SIMAN dan SAIBA
4.	Pengisian Aplikasi PUPNS
5.	Pengisian Aplikasi SIMPONI
6.	Pengisian Aplikasi I-Satya
7.	Pengisian Aplikasi SIRUP
8.	Pengisian Aplikasi E-FILLING
9.	Pengisian Aplikasi E-MONEV
10.	Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dilingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11.	Penyampaian Salinan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016

12.	Penyampaian Sk Ulp (Unit Layanan Pengadaan) Koordinator Wilayah Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI
13.	Pengumuman Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Tahun 2016 Dan Sertifikat Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN
14.	Permintaan Nama-Nama Peserta Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Yang Sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Satker Eselon I Dan Satker Upt Korwil Dipa 005.01
15.	Laporan Triwulan II TA 2016 e-Monev Bappenas berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006
16.	Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 155-1/SEK/KU.01/07/2016. Tentang Kebijakan Akuntansi dalam Rangka Penyusunan LKKL.
17.	Percepatan Penyerapan Anggaran Ma Ta 2016
18.	Upacara Bendera Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI Ke-71
19.	Ralat Amanat Tertulis Kma RI Untuk Upacara Bendera Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI
20.	Daftar Nominatif Pengangkatan CPNS Manjadi PNS Tahun 2016
21.	Petunjuk Tentang Pengajuan Surat Usulan/Permohonan Yang Ditujukan Ke Mahkamah Agung
22.	Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Pada Aplikasi Sistim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (Smart) Tahun 2016
23.	Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2016
24.	Hasil Telaah Laporan Keuangan Semester I Mahkamah Agung RI TA 2016
25.	Pemakaian Aplikasi Pnbp Pada Simari Online
26.	Pengumuman Perubahan Jadwal Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual
27.	Permintaan Pengisian Capaian Kinerja Pada Aplikasi Sistim Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan Smart Tahun 2016
28.	Permintaan Rencana Kebutuhan Bmn TA 2018
29.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal Bulan Agustus 2016 Dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Revisi
30.	Prosedur Pencatatan Pengembalian/ Penyetoran Sisa Kas Hibah Langsung Uang (Hlu) Yang Telah Disahkan Ke Kas Negara
31.	Monitoring Kepatuhan Lhkpn
32.	Pengumuman Permintaan Rencana Kebutuhan BMN TA 2018
33.	Pengumuman Persetujuan Revisi Anggaran Pada Empat Lingkungan Peradilan
34.	Pengumuman Laporan Triwulan III Tahun 2016 E-MONEV Bappenas Berdasarkan PP NO. 39 Tahun 2006
35.	Pengumuman Peringatan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2016 Revisi
36.	Pengumuman Penyusunan Lkkl Triwulan III Tahun 2016

37.	Pengumuman Perubahan Jadwal Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Tahun 2016
38.	Pengumuman Pemakaian Aplikasi Pnbp Pada Simari Online
39.	Pengumuman Seleksi Administrasi Lelang Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) Madya (Eselon I.A) Sekretaris Ma Dan (Jpt) Pratama (Eselon II.A) Kepala Biro Umum Ma Tahun 2016
40.	Jadwal Pelaksanaan Tes Assement Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Ma RI (Eselon I.A) Dan Pratama Kepala Biro Umum (Eselon II.A)
41.	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (Rkbmn) MA Tahun 2016
42.	Pengumuman Pemberitahuan Pemeriksaan Atas Kinerja Pelayanan Peradilan
43.	Pemberitahuan Penyelesaian Revisi Pagu Minus Tahun 2016
44.	Pengumuman Hasil Monitoring Evaluasi Website Pada Empat Lingkungan Badan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung RI
45.	Pengumuman Penelaahan Rka-K/L Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017
46.	permintaan ADK RKA-KL TA 2018 dan data dukung
47.	Pengumuman Pelaksanaan Sosialisasi, Monitoring, Dan Evaluasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
48.	Pemotongan Pajak Penghasilan
49.	Pengumuman Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat Satuan Kerja Bulan Oktober Dan November 2016
50.	Langkah Langkah Akhir Tahun 2016
51.	Pemberitahuan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Ta 2016 Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
52.	Pemberitahuan Permintaan Data Penghargaan Satker Ta 2016, Penginputan Rekening Lainnya Dan Realisasi Anggaran Pada Aplikasi Komdanas Dan Aplikasi Smart
53.	Mahkamah Agung "Umumkan Open Biding Jabatan Sekretaris Ma Dan Kepala Biro Umum Ma" Tahun 2016
54.	pengumuman penyampaian lkjip tahun 2016 dan dokumen perjanjian kinerja tahun 2017
55.	Penyusunan Laporan Tahunan 2016
56.	Akses Sop Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid) Dan Utang Kepada Pihak Ketiga
57.	Pengumuman Kewajiban Input Saldo Dan Unggah Dokumen Sumber Transaksi Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)/Persekot Gaji Pada Aplikasi Komdanas
58.	Pemberitahuan Perpanjangan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP
59.	Petunjuk Pengajuan Tunjangan Khusus Kinerja
60.	Pengumuman Laporan Penilaian Prestasi Kerja PNS
61.	Data Centre Mahkamah Agung Tidak Aktif Untuk Sementara

62.	Pengumuman Pengajuan Susulan/Kekurangan Tunjangan Khusus Kinerja
63.	Pengisian Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
66.	Pengumuman pengingat laporan triwulan iv ta 2016 berdasarkan pp no. 39 tahun 2006
67.	Pemberitahuan Cuti Bersama Tahun Baru 2017
68.	Pengumuman Petikan Surat Keputusan Nomor : 365/PA/SK/XII/2016 Tentang Penunjukan KPA/KPB Pada Satker Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
69.	Usulan Penghargaan Satya Karya Sewindu/Dwiwindu Serta Penghargaan Satyalencana Karya Satya X, Xx, Dan Xxx Tahun Untuk Periode Tahun 2017
70.	Kenaikan Pangkat Otomatis (Kpo) Dan Penetapan Pensiun Otomatis (Ppo) Tahun 2017
71.	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (Kpo) Dan Penetapan Pensiun Otomatis (Ppo) Tahun 2017
72.	Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi Atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
73.	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Periode April Tahun 2017
74.	Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) Periode April Tahun 2017
75.	Pengumuman Peresmian Tower Mahkamah Agung Ri Dan 134 Gedung Kantor Pengadilan
76.	Pengumuman Peresmian Tower Mahkamah Agung RI Dan 134 Gedung Kantor Pengadilan (Ralat Lampiran)
77.	Pengumuman Perpanjangan Waktu Verifikasi Data Kenaikan Pangkat Otomatis (Kpo) Periode April Tahun 2017
78.	kelengkapan data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai skp pada sikep
79.	Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp)
80.	Konfirmasi Spending Review TA 2017
81.	Pengumuman Pemberitahuan Pemeriksaan Terinci Atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2016
82.	Kelengkapan Data Pejabat Penilai Dan Atasan Pejabat Penilai Skp Pada Sikep Mahkamah Agung
83.	Laporan Penilaian Prestasi Kerja
84.	Permintaan Dokumen Pemeriksaan Oleh Bpk Ri Kepada Seluruh Pengadilan
85.	Daftar Nominatif Usul Kenaikan Pangkat Non Kpo Per April 2017
86.	Permintaan Waktu Unggah Adk Di Luar Jadwal
87.	Pengumuman Kegiatan Pembinaan Dan Konsultasi Penyusunan Program Anggaran 2018 Serta Persiapan Pelaksanaan Anggaran TA 2017
88.	Pengumuman Perpanjangan Batas Waktu Proses Penyesuaian Administratif Atas Pertanggungjawaban Transaksi Keuangan TA 2016

89.	Pengumuman Hari Libur Nasional
90.	Permintaan Dokumen Sumber Transaksi Akrual TA 2016
91.	Permintaan Daftar Nama Untuk pembentukan Organisasi Unit Layanan pengadaan (Ulp)
92.	Permintaan Dokumen Jaminan Pemeliharaan
93.	Pengumuman Permintaan Daftar Nama Untuk Pembentukan Organisasi Unit Layanan Pengadaan (Ulp)
94.	Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (PMPRB)
95.	Pelaksanaan Ujian Dinas Elektronik (E-Xam) Pada Mahkamah Agung RI Tahun 2017
96.	Himbauan Untuk Para Pejabat Eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
97.	Optimalisasi Implementasi E_Skum
98.	Pengumuman Permintaan Dokumen Terkait Uang Konsinyasi, Uang Titipan Perkara Pidana, Dan PHI
99.	Pengumuman Kebijakan Strategis Anggaran Terkait Honorarium KPA, PPK, Dan PPSPM
100.	Permintaan Data Rekening Beserta Saldo Periode 31 Desember 2016 Dan Updating Saldo Rekening Di Aplikasi Komdanas
101.	Pengumuman Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 2 Tahun 2017
102.	Kepada Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung Ri Dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Di Empat Lingkungan Peradilan Untuk Memerintahkan Kepada Para Pejabat Dan Pegawai Nya Yang Memenuhi Syarat Untuk Mengikuti Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi